

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2022**

Satker: Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Target Prov	
			Volume	Satuan
1	2	3	4	5
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU			
BAH	Pelayanan Publik Lainnya		2	Layanan
	Indikator KRO :			
	01 Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP		100	%
001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi		1	Layanan
	Komponen Input :			
	051 Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran: 1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran (2 laporan) 2. laporan penyelenggaraan penanganan pelanggaran	3	Laporan
	052 Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses: 1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran (2 laporan) 2. laporan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	3	Laporan
002	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Layanan
	Komponen Input :			
	051 Koordinasi penanganan pelanggaran	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	20	Laporan
	052 Koordinasi penyelesaian sengketa proses	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	20	Laporan
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga
	Indikator KRO :			
	01 Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		1	Daerah
001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		1	Lembaga
	Komponen Input :			
	051 Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah
BKC	Pemantauan Lembaga		88	Laporan
	Indikator KRO :			
	01 Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan		100	%
001	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Provinsi		8	Laporan
	Komponen Input :			
	051 Pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan
	052 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan	2	Laporan
	054 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan: - IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan.	4	Laporan
	055 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (IDI variabel Hak Memilih & Dipilih ,Indikator Nomor 12)	1	Laporan
002	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota		80	Laporan
	Komponen Input :			
	051 Pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	10	Laporan
	052 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan	20	Laporan
	054 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan: - IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan.	40	Laporan
	055 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (IDI variabel Hak Memilih & Dipilih ,Indikator Nomor 12)	10	Laporan
6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN			
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		11	Lembaga
	Indikator KRO :			
	01 Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan perencanaan program dan anggaran		11	Daerah
005	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu		1	Lembaga
	Komponen Input :			
	051 Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Dokumen
	052 Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2	Laporan
	053 Fasilitasi dan pembinaan aparat pengawas pemilu	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparat pengawas pemilu	4	Laporan
	054 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan
	055 Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan
	056 Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan
	057 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	4	Laporan
006	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu		10	Lembaga
	Komponen Input :			
	051 Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	10	Laporan
	052 Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	20	Laporan
	053 Fasilitasi dan pembinaan aparat pengawas pemilu	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparat pengawas pemilu	40	Laporan
	054 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	20	Laporan
	055 Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	40	Laporan
	056 Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	40	Laporan
	057 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	40	Laporan
6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU			
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		11	Lembaga
	Indikator KRO :			
	01 Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu		11	Daerah
002	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi		1	Lembaga
	Komponen Input :			
	051 Publikasi dan dokumentasi	Jumlah laporan Publikasi dan dokumentasi	1	Laporan
	052 Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan
	053 Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan
	054 Fasilitasi sentra gakkumdu	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan
	055 Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan
003	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota		10	Lembaga
	Komponen Input :			
	051 Publikasi dan dokumentasi	Jumlah laporan Publikasi dan dokumentasi	10	Laporan
	052 Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	10	Laporan
	053 Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	10	Laporan
	054 Fasilitasi sentra gakkumdu	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	10	Laporan
	055 Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	10	Laporan
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
5156	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM			
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		6	Layanan
	Indikator KRO :			
	01 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan manajemen internal Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		100	%
956	Layanan BMN		1	Layanan
	Komponen Input :			
	051 Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan: 1. Laporan inventarisasi aset persemester 2. Laporan SIMAK BMN persemester 3. Laporan Pembinaan (Bimtek) pengelolaan BMN 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan ke Kab/Kota	6	Laporan
	052 Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset per semester	20	Laporan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2022

Satker: Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Target Prov	
			Volume	Satuan
1	2	3	4	5
957	Layanan Hukum		1	Layanan
	Komponen Input :			
	051 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan: 1. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum 2. Laporan supervisi dan monitoring evaluasi pelaksanaan produk hukum ke Kab/Kota	2	Laporan
	052 Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah diseminasi produk hukum yang diselenggarakan sesuai SOP	1	Laporan
	053 Fasilitas pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	10	Laporan
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1	Layanan
	Komponen Input :			
	051 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi: keterbukaan informasi publik (Indikator IKU) 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu provinsi 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi ke Kab/Kota	5	Laporan
	052 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi: 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu Kab/Kota	40	Laporan
963	Layanan Data dan Informasi		1	Layanan
	Komponen Input :			
	051 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia: 1. Laporan pengelolaan dan pengembangan PPID persemester 2. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik ke Kab/Kota	3	Laporan
	052 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID persemester	20	Laporan
969	Layanan Bantuan Hukum		1	Layanan
	Komponen Input :			
	051 Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan
994	Layanan Perkantoran		1	Layanan
	Komponen Input :			
	001 Gaji dan tunjangan	Jumlah laporan gaji dan tunjangan	1	Layanan
	002 Operasional dan pemeliharaan kantor	Jumlah laporan operasional dan pemeliharaan kantor	1	Layanan
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		68	Unit
	Indikator KRO :			
	01 Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan		80	%
951	Layanan Sarana Internal		68	Unit
	Komponen Input :			
	052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	3	Unit
	053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	3	Unit
	055 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	17	Unit
	056 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	45	Unit
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		250	Orang
	Indikator KRO :			
	01 Persentase penyelesaian pelayanan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		100	%
954	Layanan Manajemen SDM		250	Orang
	Komponen Input :			
	051 Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparat pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	50	Orang
	052 Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparat pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	200	Orang
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		218	Dokumen
	Indikator KRO :			
	01 Persentase penyelesaian pelayanan manajemen kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		100	%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		12	Dokumen
	Komponen Input :			
	051 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran: 1. Dokumen Renja dan Renja Perubahan 2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) dan revisi anggaran	2	Dokumen
	052 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	10	Dokumen
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		17	Dokumen
	Komponen Input :			
	051 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program: 1. Dokumen SAKIP (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja dan perjanjian kinerja perubahan, Rencana Aksi, LKIP, SK- IKU) 2. Laporan Rencana Penyerapan Anggaran per triwulan 3. Laporan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kinerja sesuai dengan rencana aksi, RKA, dan dokumen perencanaan lainnya 4. Laporan supervisi dan monitoring pelaksanaan program ke Kab/Kota	7	Dokumen
	052 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	10	Dokumen
955	Layanan Manajemen Keuangan		134	Dokumen
	Komponen Input :			
	051 Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan: 1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran bulanan 2. Laporan keuangan semesteran	14	Dokumen
	052 Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan: Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran pembantu bulanan	120	Dokumen
961	Layanan Reformasi Kinerja		44	Dokumen
	Komponen Input :			
	051 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan masyarakat	4	Dokumen
	052 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan masyarakat	40	Dokumen
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		11	Dokumen
	Komponen Input :			
	051 Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen
	052 Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	10	Dokumen